

Analisis Kesadaran Partisipasi Politik Pemuda di Era Digital dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Vika*, Syamzaimar

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pssh.v3i4.641>

*Correspondence: Vika

Email: 295.vika@gmail.com

Received: 28-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 10-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan media sosial dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi politik generasi muda di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui kajian berbagai jurnal, buku, dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKn memiliki peran penting dalam membentuk karakter demokratis, sikap kritis, serta tanggung jawab warga negara melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi. Sementara itu, media sosial berperan sebagai sarana utama dalam memperluas akses informasi politik, membangun ruang diskusi publik, serta mendorong keterlibatan politik generasi muda melalui aktivitas digital seperti kampanye online, penyebaran informasi, dan partisipasi dalam isu sosial. Namun, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi opini, serta rendahnya literasi digital dan politik yang dapat memengaruhi kualitas partisipasi politik pemuda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi politik generasi muda mengalami pergeseran dari bentuk konvensional menuju partisipasi berbasis

digital yang lebih fleksibel, namun masih memerlukan penguatan literasi politik dan literasi digital agar partisipasi yang dilakukan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas, kritis, dan bertanggung jawab dalam mendukung demokrasi.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Media Sosial, Partisipasi Politik, Generasi Muda, Era Digital.

Abstract: This study aims to analyze the role of Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan/PKn) and social media in enhancing political awareness and political participation among young people in the digital era. This research employs a qualitative method with a library research approach by reviewing various journals, books, and relevant academic literature. The findings indicate that Civic Education plays an important role in shaping democratic character, critical thinking skills, and civic responsibility through the internalization of Pancasila values and democratic principles. Meanwhile, social media serves as a primary platform for expanding access to political information, creating public discussion spaces, and encouraging youth political participation through digital activities such as online campaigns, information sharing, and engagement in social issues. However, digital technological development also presents challenges, including the spread of hoaxes, hate speech, opinion polarization, and low levels of digital and political literacy, which may affect the quality of youth political participation. This study concludes that youth political participation has shifted from conventional forms to more flexible digital-based participation. Nevertheless, strengthening political literacy and digital literacy remains essential to ensure that such participation is not only quantitative but also critical, responsible, and contributes positively to democratic development.

Keywords: Civic Education, Social Media, Political Participation, Youth, Digital Era.

Pendahuluan

Kesadaran politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan demokrasi karena berkaitan dengan pemahaman warga negara terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingginya tingkat kesadaran politik masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan politik, seperti pemilihan umum, pengawasan kebijakan publik, serta penyampaian aspirasi secara konstruktif. Bagi generasi muda, kesadaran politik menjadi modal utama dalam mempersiapkan diri sebagai penerus bangsa yang mampu menjaga keberlangsungan demokrasi dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik ([Yasa dkk., 2025](#)).

Generasi muda saat ini tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Mereka memiliki akses luas terhadap berbagai informasi melalui internet dan media sosial. Kondisi ini memberikan peluang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan partisipasi sosial, namun juga menimbulkan tantangan berupa ketergantungan teknologi, banjir informasi, serta menurunnya minat terhadap isu-isu publik yang memerlukan pemahaman mendalam ([Soffi dkk., 2025](#)).

Media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi politik bagi generasi muda. Berbagai platform digital memungkinkan pengguna memperoleh informasi politik secara cepat dan mudah. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, informasi yang tidak terverifikasi, serta rendahnya kemampuan sebagian pengguna dalam melakukan analisis kritis terhadap informasi yang diterima. Oleh karena itu, literasi politik menjadi sangat penting agar generasi muda mampu memahami informasi politik secara objektif, membedakan fakta dan opini, serta berpartisipasi secara cerdas dalam kehidupan demokrasi. Selain sebagai sarana komunikasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pendidikan politik yang efektif apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab ([Alamri dkk., 2023](#)).

Secara fundamental, kesadaran politik dapat ditumbuhkan melalui dua jalur utama: pendidikan politik formal dan informal. Pendidikan formal di sekolah berfungsi sebagai fondasi melalui kurikulum yang menanamkan pemahaman hak warga negara dan sistem pemerintahan. Sebagaimana ditegaskan oleh [Maarisit \(2015\)](#), sekolah dan keluarga merupakan fasilitator sosialisasi politik yang vital. Keluarga menanamkan nilai kepemimpinan sejak dini, sementara sekolah memberikan ruang simulasi demokrasi, seperti melalui pemilihan OSIS. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 yang menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi generasi penerus memasuki era digital, lanskap politik mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Teknologi telah menjadi sistem komunikasi utama yang mendukung perkembangan politik modern.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting. PKn tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang demokratis, kritis, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik dibekali kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan politik

yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, PKn dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran politik generasi muda sekaligus memperkuat kemampuan literasi politik mereka di era digital ([Jannah dkk., 2024](#)).

Bagi Gen Z, digitalisasi memungkinkan partisipasi tanpa batasan ruang dan waktu melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. John Postill mengidentifikasi bahwa keterlibatan politik digital kini mencakup aspek pemerintahan, demokrasi, kampanye, hingga mobilisasi kelompok kepentingan. Fenomena ini membawa peluang sekaligus tantangan; di satu sisi memperluas akses informasi bagi masyarakat pedesaan, namun di sisi lain memunculkan risiko media malaise—di mana rendahnya kualitas informasi digital justru dapat mengurangi minat politik.

Meskipun akses teknologi melimpah, tantangan utama tetap terletak pada relevansi isu politik dengan kehidupan sehari-hari kaum muda. Isu-isu seperti kesempatan kerja, pendidikan, dan lingkungan hidup menjadi pintu masuk yang efektif untuk meningkatkan motivasi politik mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Almond, modernisasi dan teknologi digital memberikan ruang bagi kaum intelektual muda untuk menyebarkan ide konstruktif guna memengaruhi opini publik ([Khakim, 2024](#)).

Di era digital yang ditandai oleh kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi, sosialisasi politik dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menghadapi dinamika yang semakin kompleks. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi, tetapi juga merevolusi cara masyarakat mengakses informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Fenomena ini menuntut pemahaman mendalam mengenai tantangan serta dampak teknologi terhadap keterlibatan politik generasi muda, yang kini menjadikannya sebagai instrumen utama dalam membentuk arah bangsa.

Platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube telah bertransformasi menjadi sumber utama informasi politik bagi generasi milenial dan Gen Z. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran sentral untuk memanfaatkan potensi positif media sosial guna menyebarkan informasi politik yang akurat dan relevan. Melalui pembelajaran PKn yang adaptif, generasi muda diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, serta mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dan cerdas dalam kegiatan bermasyarakat.

Namun, kemudahan akses informasi di ruang digital membawa tantangan signifikan, terutama terkait risiko tersebarnya informasi yang tidak akurat, terdistorsi, hingga fenomena filter bubble (gelembung informasi). Fenomena ini cenderung memerangkap individu dalam polarisasi pandangan yang hanya sejalan dengan keyakinan pribadi mereka. Oleh karena itu, literasi media menjadi aspek krusial dalam kurikulum pendidikan di era digital. Peserta didik perlu diberdayakan dengan keterampilan kritis untuk menilai keandalan informasi online, membedakan fakta dari opini, serta mengidentifikasi potensi bias yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Pentingnya revitalisasi sosialisasi politik juga tercermin pada perubahan bentuk partisipasi. Generasi muda saat ini lebih cenderung terlibat dalam aksi politik daring, seperti kampanye digital, petisi online, dan penyuaan opini melalui platform sosial. Pendidikan Kewarganegaraan harus merespons bentuk partisipasi baru ini dengan menekankan pada etika bermedia sosial. Kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam penggunaan media digital menjadi kunci untuk membentuk generasi yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan demokrasi, bukan sekadar menjadi pengguna pasif.

Lebih lanjut, dalam konteks globalisasi, teknologi digital membuka peluang bagi peserta didik untuk terhubung dengan jaringan global dan memahami isu-isu politik internasional. Hal ini mendorong terbentuknya nilai-nilai keterbukaan dan pluralisme melalui kolaborasi lintas bangsa dalam mengatasi tantangan global. Dengan pendekatan yang holistik—mencakup literasi media, partisipasi daring, etika digital, dan wawasan global—sosialisasi politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kunci untuk melahirkan warga negara yang cerdas dan terlibat aktif dalam masyarakat demokratis yang semakin terhubung dan kompleks. ([Ardiani dkk., 2024](#))

Transformasi budaya kewargaan di Indonesia saat ini berada pada titik temu antara nilai lokal dan arus globalisasi digital. Fenomena ini, menurut teori parallelization Boman (2021), menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak menghapus identitas lokal, melainkan menciptakan ruang negosiasi aktif yang memperkaya praktik kewargaan. Di tengah disrupsi digital, masyarakat Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi aktor aktif yang merevitalisasi nilai tradisional seperti gotong royong, Sira' na Pacce di Makassar, dan Pela Gandong di Ambon ke dalam ekspresi digital yang partisipatif.

Namun, digitalisasi membawa ambivalensi berupa risiko disinformasi, polarisasi, dan komodifikasi budaya yang mengancam kohesi sosial. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peran sentral sebagai medium transformasi strategis. PKn tidak lagi terbatas pada status hukum, melainkan berevolusi menjadi kewargaan digital (digital citizenship) yang mengedepankan tanggung jawab moral, etika digital, dan literasi kritis. Sejalan dengan konsep technological humanism, PKn harus mampu merekontekstualisasi kearifan lokal menjadi prinsip etika global yang inklusif. Melalui pedagogi yang reflektif-partisipatif, PKn diarahkan untuk membentuk warga negara yang cerdas dan berbudaya, yang mampu menyeimbangkan individualitas digital dengan solidaritas sosial demi menjaga integritas demokrasi di ruang publik virtual. Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana transformasi budaya kewargaan berlangsung melalui integrasi nilai lokal dan pendidikan etika di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda di era digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan literasi politik yang muncul akibat perkembangan media sosial serta mengkaji bagaimana transformasi budaya kewargaan dapat mendukung terbentuknya partisipasi politik generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Hasil penelitian diharapkan

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan penguatan budaya demokrasi di kalangan generasi muda ([Patmawati dkk., 2025](#)).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau kajian literatur (library research). Pendekatan studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kesadaran partisipasi politik pemuda di era digital dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, memahami, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumen resmi, laporan penelitian, serta referensi lain yang mendukung pembahasan mengenai partisipasi politik pemuda, pendidikan kewarganegaraan, demokrasi, media sosial, dan perkembangan teknologi digital dalam kehidupan politik masyarakat ([Denis Irwandi dkk., 2023](#)).

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena kesadaran politik pemuda serta bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk sikap demokratis, kritis, dan partisipatif pada generasi muda di era digital. Penelitian ini tidak berfokus pada angka atau perhitungan statistik, melainkan lebih menekankan pada pemahaman terhadap berbagai fenomena sosial dan politik yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan pemuda dalam kehidupan demokrasi.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji berbagai bentuk partisipasi politik pemuda di era digital, seperti penggunaan hak pilih dalam pemilu, keterlibatan dalam diskusi politik di media sosial, partisipasi dalam organisasi kepemudaan, serta aktivitas penyampaian pendapat melalui platform digital. Selain itu, penelitian ini juga membahas pengaruh media sosial dan teknologi digital terhadap pola partisipasi politik generasi muda. Media digital dinilai memiliki peran penting sebagai sarana penyebaran informasi politik, pendidikan politik, dan komunikasi demokrasi yang dapat meningkatkan kesadaran politik pemuda. Namun demikian, perkembangan media digital juga dapat memberikan dampak negatif berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi politik yang tidak benar sehingga diperlukan pemahaman politik yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan.

Langkah-langkah penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi masalah penelitian, menentukan fokus kajian, mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, melakukan analisis isi terhadap data yang diperoleh, serta menyusun hasil kajian secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi politik pemuda di era digital.

Metode penelitian ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang luas, mendalam, dan sistematis mengenai fenomena partisipasi politik pemuda berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan dan terpercaya. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk generasi muda yang sadar politik, aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, serta mampu menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. ([Amelia & Ridhoh, 2025](#))

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian pustaka dari berbagai jurnal dan literatur ilmiah, ditemukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), media sosial, serta perkembangan teknologi digital memiliki pengaruh yang besar terhadap kesadaran dan partisipasi politik generasi muda di era digital. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk karakter demokratis, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab sosial peserta didik sebagai warga negara. Melalui pembelajaran PKn yang kontekstual dan partisipatif, generasi muda tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, media sosial menjadi sarana utama bagi pemuda dalam memperoleh informasi politik, menyampaikan pendapat, serta mengikuti berbagai aktivitas demokrasi secara digital. Kehadiran platform digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda melalui diskusi publik, kampanye online, dan penyampaian aspirasi secara terbuka. Namun, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi sosial, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Partisipasi politik pemuda di era digital menunjukkan adanya perubahan pola keterlibatan politik dari bentuk konvensional menuju aktivitas berbasis digital yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya minat politik dan sikap apatis sebagian generasi muda terhadap kehidupan politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan kewarganegaraan, literasi digital, serta pembelajaran politik yang lebih relevan agar generasi muda mampu menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjaga demokrasi di era digital.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Pemuda

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis sebagai instrumen transformasional untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. PKn tidak hanya berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal, nasional, dan global dengan nilai-nilai religius, tetapi juga berperan sebagai benteng ideologis dalam memperkuat identitas nasional serta kesadaran kritis terhadap isu sosial-politik di tengah arus globalisasi. Melalui pendekatan yang aplikatif, PKn menanamkan semangat kebhinekaan dan toleransi untuk menciptakan harmoni sosial, sekaligus membekali individu dengan kompetensi global agar mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan masyarakat madani yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual ([Syamzaimar, 2025](#)).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran politik pemuda melalui penanaman nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta sikap kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan politik. Melalui pembelajaran PKn, generasi muda diarahkan untuk mampu berpikir rasional, berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, serta memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana penting dalam membentuk generasi muda yang sadar politik, demokratis, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 ([Fauzi & Srikantono, 2013](#)).

Selain itu, pembelajaran PKn juga berperan dalam meningkatkan kesadaran politik melalui pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis nilai demokrasi. PKn tidak hanya memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis, sikap demokratis, serta keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan pembelajaran seperti diskusi, simulasi pemilu, studi kasus politik lokal, serta pemanfaatan media digital dapat membantu pemuda memahami pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi dan kehidupan publik. Integrasi nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kerja sama sosial dalam pembelajaran PKn juga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian sosial, dan partisipasi aktif generasi muda terhadap berbagai persoalan politik di lingkungan sekitarnya ([Yasa dkk., 2025](#)).

Dalam konteks mahasiswa, Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap berbagai persoalan politik dan sosial di Indonesia. Pembelajaran PKn tidak hanya berfokus pada pemahaman teori kewarganegaraan, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mampu menyampaikan aspirasi, berpikir kritis, dan terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi. Pengaitan materi PKn dengan isu-isu politik aktual, seperti pemilu, korupsi, dan kebijakan publik, dapat membantu pemuda memahami realitas politik secara lebih kontekstual sekaligus mendorong keterlibatan mereka dalam diskusi maupun kegiatan sosial politik. Melalui proses tersebut, generasi muda dapat mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mendukung partisipasi politik secara aktif, demokratis, dan bertanggung jawab ([Fauzy dkk., 2024](#)).

Pada akhirnya, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu sarana strategis dalam membentuk generasi muda yang demokratis, kritis, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran politik yang tinggi. Melalui pembelajaran PKn, pemuda dibekali pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, nasionalisme, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan dalam membangun karakter generasi muda agar memiliki sikap cinta tanah air, toleransi, kepedulian sosial, dan kemampuan berpikir kritis terhadap

berbagai dinamika kebangsaan. Dengan demikian, PKn diharapkan mampu membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter, demokratis, aktif dalam kehidupan masyarakat, serta memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 ([Fadhilah & Dewi, 2021](#)).

Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Pemuda

Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas politik yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting karena keberhasilan demokrasi sangat ditentukan oleh keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik, seperti memilih golput pada saat pemilu karena menganggap politik tidak memberikan dampak terhadap kehidupan mereka. Menurut beberapa ahli, partisipasi politik dapat diwujudkan melalui kegiatan memilih dalam pemilu, mengikuti kampanye, menyampaikan aspirasi, menghadiri rapat politik, hingga ikut mengawasi jalannya kebijakan publik. Partisipasi politik tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tetapi juga oleh masyarakat umum sebagai bentuk hak warga negara dalam negara demokratis. Oleh karena itu, pendidikan politik dan kesadaran politik masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat mampu memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi serta mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa ([Suparto, 2021](#)).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan politik masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Media sosial yang awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan kini berkembang menjadi media penyebaran informasi politik, ruang diskusi publik, serta sarana partisipasi demokrasi di era digital. Kehadiran platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, dan WhatsApp membuat informasi politik dapat diakses dengan cepat, mudah, dan luas oleh masyarakat. Generasi muda sebagai kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan teknologi digital sehingga media sosial mampu mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku politik mereka. Melalui media sosial, pemuda dapat memperoleh berbagai informasi mengenai pemilu, kebijakan pemerintah, profil kandidat politik, hingga isu sosial dan demokrasi yang berkembang di masyarakat sehingga mampu meningkatkan pengetahuan politik dan kesadaran demokrasi generasi muda ([Polii dkk., 2020](#)).

Media sosial juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang interaktif karena pemuda tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta berdiskusi mengenai berbagai isu politik secara terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi politik mengalami perubahan dari bentuk konvensional menuju partisipasi politik digital yang lebih fleksibel dan mudah dilakukan. Bentuk partisipasi politik digital dapat dilihat melalui aktivitas mengikuti kampanye politik online, menyebarkan informasi politik, membuat konten edukasi politik, memberikan komentar terhadap kebijakan pemerintah, hingga mengikuti gerakan sosial melalui media sosial. Kampanye politik melalui media sosial dinilai lebih efektif dalam menarik perhatian

generasi muda karena menggunakan konten yang singkat, menarik, visual, dan mudah dipahami. Selain itu, media sosial juga membantu generasi muda untuk lebih mengenal profil calon pemimpin dan mengikuti perkembangan politik nasional maupun daerah sehingga dapat meningkatkan keterlibatan politik dalam proses demokrasi ([Putricia dkk., 2024](#))

Di sisi lain, media sosial turut memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kesadaran kritis generasi muda terhadap berbagai isu sosial dan politik. Pemuda dapat mengikuti diskusi publik, memahami berbagai sudut pandang, serta lebih cepat merespons kebijakan pemerintah dan persoalan demokrasi yang berkembang di masyarakat. Media sosial bahkan sering digunakan sebagai sarana mobilisasi massa dalam berbagai gerakan sosial dan aksi demokrasi sehingga mampu membentuk budaya politik partisipatif di kalangan generasi muda. Akan tetapi, penggunaan media sosial dalam kehidupan politik juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti maraknya penyebaran hoaks, propaganda politik, ujaran kebencian, dan disinformasi yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat serta menimbulkan polarisasi politik. Rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian generasi muda mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, partisipasi politik digital terkadang hanya terbatas pada aktivitas di media sosial tanpa diimbangi keterlibatan nyata dalam kegiatan politik di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan perlu diperkuat agar generasi muda mampu berpikir kritis, memahami etika komunikasi digital, serta bijak dalam menyaring informasi politik. Dengan demikian, media sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda di era digital, baik dalam memperluas akses informasi politik, meningkatkan kesadaran demokrasi, maupun mendorong keterlibatan generasi muda dalam kehidupan politik secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab ([Saputra & Supriono, 2024](#)).

Bentuk Partisipasi Politik Pemuda di Era Digital

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah bentuk partisipasi politik masyarakat, khususnya pemuda, dari yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi lebih banyak melalui media daring. Bentuk partisipasi politik pemuda di era digital ini mengalami perubahan dari pola konvensional atau kegiatan politik formal menuju aktivitas berbasis media digital yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Kehadiran media digital memberikan ruang yang luas bagi pemuda untuk terlibat dalam kehidupan demokrasi, membangun opini publik, dan meningkatkan kesadaran politik (Zuhdi, 2020).

Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi mengenai isu politik, mengikuti kampanye, menyebarkan informasi, serta mendukung gerakan sosial dan demokrasi secara online. Generasi muda kini lebih aktif menyampaikan pendapat, menyebarkan informasi politik, membuat konten, menandatangani petisi daring, serta mengikuti kampanye sosial melalui platform digital. Kemudahan akses informasi membuat keterlibatan politik masyarakat semakin meningkat karena setiap individu dapat berpartisipasi kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Berbagai gerakan sosial yang berkembang di media digital menunjukkan bahwa

pemuda memiliki peran penting dalam mobilisasi opini dan partisipasi demokrasi di era modern ([Katili dkk., 2025](#)).

Namun, partisipasi politik di era digital juga menghadapi berbagai tantangan. Partisipasi tersebut masih sering bersifat reaktif dan simbolis karena banyak generasi muda terlibat hanya melalui aktivitas seperti like, share, atau komentar tanpa memahami substansi isu politik secara mendalam. Selain itu, rendahnya literasi politik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta kecenderungan mengikuti isu yang sedang viral tanpa pemahaman yang mendalam menjadi tantangan dalam membangun partisipasi politik yang kritis dan berkualitas ([Sobali Suswandy dkk., 2025](#)).

Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi politik dan literasi digital agar partisipasi politik pemuda tidak hanya aktif secara online, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan demokrasi. Masyarakat, terutama generasi muda, perlu memiliki literasi digital dan sikap kritis dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi agar partisipasi politik dapat berkembang secara kritis dan bertanggung jawab dalam mendukung demokrasi ([Turahmi dkk., 2025](#)).

Bentuk partisipasi politik pemuda di era digital menunjukkan pergeseran dari pola konvensional menuju keterlibatan berbasis media sosial yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai politik dan pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta aktif mengikuti proses politik melalui berbagai platform digital seperti media sosial, debat kandidat, dan informasi daring. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil yang sempat mempertimbangkan untuk tidak berpartisipasi atau menjadi golput, yang menunjukkan adanya dinamika sikap politik di kalangan pemuda. Di sisi lain, media sosial menjadi sarana utama dalam meningkatkan kesadaran politik, namun juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoaks, opini yang bersifat provokatif, serta pengaruh buzzer yang dapat memicu perpecahan dan menurunkan kualitas diskursus politik. Oleh karena itu, partisipasi politik pemuda di era digital tidak hanya bersifat aktif secara kuantitas, tetapi juga perlu ditingkatkan kualitasnya melalui penguatan literasi politik dan literasi digital agar generasi muda mampu berpartisipasi secara kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam mendukung perkembangan demokrasi ([Kusnandi dkk., 2024](#)).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Temuan ini berimplikasi bahwa PKn dan literasi digital harus disinergikan sebagai fondasi utama agar partisipasi politik generasi muda di era media sosial tidak hanya tinggi secara kuantitas tetapi juga substantif, kritis, dan bertanggung jawab, mengingat media sosial memang memperluas akses informasi dan ruang diskusi namun juga memunculkan risiko hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, serta partisipasi yang bersifat simbolis akibat rendahnya literasi. Oleh karena itu, secara praktis disarankan agar kurikulum PKn di sekolah dan kampus diperkuat dengan modul literasi digital, verifikasi informasi, dan etika berdemokrasi daring, serta pemerintah, sekolah, dan platform digital perlu berkolaborasi

menyelenggarakan pelatihan, kampanye anti-hoaks, dan ruang diskusi yang sehat bagi pemuda. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengkaji efektivitas model pembelajaran PKn berbasis digital dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik, mengukur dampak intervensi literasi digital terhadap penurunan penyebaran hoaks, dan melakukan studi komparatif antarwilayah untuk memahami faktor sosial-budaya yang memengaruhi partisipasi politik digital generasi muda di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alamri, J., Bena, M., Katili, Y., & Tabo, S. (2023). *Pendidikan politik generasi muda melalui instrumen media sosial*.
- Amelia, D. P., & Ridhoh, M. Y. (2025). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda di Kabupaten Enrekang. *Open Access*, 10(11).
- Ardiani, D., Kartini, D. S., & Herdiansyah, A. G. (2024). Pendidikan kewarganegaraan di era digital (Perspektif teori sosialisasi politik). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18–29. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>
- Denis Irwandi, M., Akbar, R., & Santa, R. (2023). Analisis kesadaran generasi muda Indonesia dalam dunia politik. *Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA)*, 2(1), 107–116. <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.82>
- Fadhilah, R. A. Z., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter nasionalisme generasi muda (Pemuda pemudi Ujung Berujung). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 159–169. <https://doi.org/10.31571/pkn.v5i2.2588>
- Fauzi, I., & Srikantono. (2013). *Pendidikan kewarganegaraan (Civil education)*.
- Fauzy, A. A., Rizqillah, I., Febriani, A. K., & Herwandi, F. P. (2024). Pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran politik mahasiswa.
- Idaa, R., Mashud, M., Saud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2025). Politics in Indonesia: Democracy, social networks and youth political participation. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2432071>
- Jannah, M., Sukmana, O., & Susilo, R. K. D. (2024). Menjelajahi potensi media sosial dalam memperkaya literasi politik generasi muda: Tinjauan pustaka. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i2.248>
- Katili, A. Y., Katili, A. A. Z., & Pariono, A. (2025). Partisipasi politik generasi muda di era digital: Antara kesadaran kritis dan aktivisme daring. <https://doi.org/10.69623/j-emspol.v2i4.175>
- Khakim, M. S. (2024). Partisipasi politik generasi muda pada pemilihan umum tahun 2024. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 98–116. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.47>
- Kusnandi, A., Pramadhani, A. R. O., Ismawan, F. W., Septin, F., Dewi, H. S., Farhanisya, J. C. N., Hayati, L. R. N., Ekatanti, R. A., Ramadhani, S. P., & Aulia, T. (2024). Mengembangkan potensi politik generasi muda: Tantangan dan prospek partisipasi politik mahasiswa FISIP UNNES di era digital, 3(2).

- Nam, C., & Kidd, D. C. (2024). How young people get from voice to influence for change: Exploring the relations between tactical choices and civic efficacy. *Journal of Information Technology & Politics*, 21(4), 547–563. <https://doi.org/10.1080/19331681.2024.2313651>
- Patmawati, S. A., Satrul, H. S., & Asriadi, M. (2025). *Transformasi budaya kewargaan di era digital: Studi budaya Makassar dan Ambon*.
- Peart, M., Higgins, S., Gutiérrez-Esteban, P., & Cubo Delgado, S. (2024). Digital and socio-civic skills development and young people's perceptions of digital citizenship in the United Kingdom. *Education, Citizenship and Social Justice*, 19(3), 301–318. <https://doi.org/10.1177/17461979231170232>
- Polii, E. Z. F., Pati, A. B., & Potabuga, J. (2020). Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik kaum milenial dalam pemilihan umum di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019.
- Putricia, N. D., Febriyanti, A. I., Puteri, N. D., Rohmatus, A., & Puspita, A. M. I. (2024). Studi literatur: Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik Gen Z (Zoomers). *Jurnal Komunikasi*.
- Saputra, M. A., & Supriono. (2024). *Pengaruh media massa terhadap partisipasi pemuda dalam politik*, 14.
- Sobali Suswandy, M., Hendriyana, M., Saputra, R., Fatah, M. A., Latif, L., & Sidik, B. F. (2025). Keterlibatan politik generasi muda di era digital: Dinamika, tantangan, dan peluang dalam pendekatan kualitatif. *Educatus*, 3(2), 17–25. <https://doi.org/10.69914/educatus.v3i2.39>
- Soffi, D., Faradilla, D., Sinuraya, S. Y., & Bakri, A. (2025). Peran literasi digital dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan generasi muda di era Society 5.0, 2(7).
- Suparto, D. (2021). *Membangun kesadaran dan partisipasi politik masyarakat* (2nd ed.).
- Syamzaimar. (2025). *Pendidikan kewarganegaraan, implementasi pengamalan Islam*.
- Turahmi, H., Azizah, Z., & Mutia, C. E. (2025). Peran pemuda dalam mewujudkan demokrasi digital: Analisis praktik komunikasi politik di media sosial. *Sagita Academia Journal*, 3(4), 106–113. <https://doi.org/10.61579/sagita.v3i4.703>
- Yasa, I. W. D., Sanjaya, D. B., & Suastika, I. N. (2025). Pendidikan kewarganegaraan sebagai kesadaran politik di kalangan generasi muda. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 5(6). <https://doi.org/10.17977/um065.v5.i6.2025.10>
- Zuhdi, M. (2020). *Komunikasi politik di era virtual*.